

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta saat ini memiliki persaingan yang sangat ketat. Secara umum setiap koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan melakukan simpanan. Dewasa ini akuntansi sebagai salah satu disiplin ilmu yang sangat besar pengaruhnya dalam dunia usaha tidak terkecuali dalam dunia koperasi, oleh karena itu peranan seorang ahli akuntansi sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi dalam dunia usaha/bisnis terutama dalam bidang pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Selain pencatatan dan penyusunan laporan, seorang akuntansi juga harus dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas akuntansi sehingga koperasi dapat berjalan dengan semestinya, tentu saja fungsi kas memiliki peranan yang sangat penting.

Dewasa ini koperasi memberikan pinjaman kepada para anggota untuk membantu kepentingan yang sangat dibutuhkan oleh anggota tersebut, sehingga mereka tidak perlu lagi meminjam keluar dengan bunga yang sangat besar memberatkan para nasabah. Pemberian kredit ini akan menimbulkan piutang dimana para nasabah dapat memiliki uang sesuai dengan yang dipinjam dan melakukan

pembayaran beberapa kemudian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi tersebut.

Piutang memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup koperasi. Piutang dikatakan likuid apabila dengan satu langkah piutang dapat segera berubab menjadi kas, sedangkan dengan kas koperasi dapat memperoleh modal kerja yang diharapkan untuk memiliki perputaran operasi koperasi selanjutnya,. Oleh karena itu, koperasi harus dapat mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan piutangnya.

Kelalaian dalam mengendalikan piutang tidak jarang akan berakibat fatal bagi koperasi, misalnya karena banyaknya piutang tertunggak, piutang macet sehingga semakin banyak dana yang tertahan pada piutang yang mengakibatkan terhambat kelancaran operasi koperasi tersebut. Oleh sebab itu koperasi harus memiliki sistem pengawasan yang baik untuk dapat mengamankan harta koperasi terhadap penyelewengan, penipuan , penggelapan serta pemborosan yang dilakukan oleh karyawan koperasi.

Menurut Bank Dunia, di negara Indonesia, terdapat 16% dari jumlah penduduk hidup dalam kemiskinan. Artinya, kurang lebih 33 juta orang Indonesia hidup dengan kesulitan keuangan yang cukup banyak. Pemerintah Indonesia sudah lama berjuang untuk mengurangi keadaan kemiskinan tersebut. Sudah ada banyak program dan kebijakan yang terlaksana. Akan tetapi, akhbir-akhir ini,